

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sofyandi (2007:175) ketika seorang individu berusaha mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi tanpa menggunakan paksaan, usaha ini digambarkan sebagai kepemimpinan.

Pemimpin sebagai pemegang kekuasaan penuh sangat besar pengaruhnya dalam setiap pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu sangat diharapkan seorang pemimpin yang dapat berpikir atau mengambil sebuah keputusan dalam keadaan di bawah tekanan, artinya dalam situasi seburuk apapun diharapkan seorang pemimpin dapat mengeluarkan suatu keputusan/kebijakan demi terwujudnya tujuan bersama.

Menurut Darmadi (2005:13) bahwa jika kekuasaan tidak dapat terbagikan dengan baik, dengan kata lain kekuasaan yang terpusat, maka kekuasaan seperti ini cenderung membuat korupsi, artinya kekuasaan yang mutlak membuat korupsi (*Lord Acton*).

Safaria (2004:4) mengatakan bahwa pemimpin mempengaruhi bawahannya, demikian sebaliknya. Orang-orang yang terlibat dalam hubungan tersebut menginginkan sebuah perubahan sehingga pemimpin diharapkan mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam organisasi.

Adanya hubungan yang baik antara seorang pemimpin dan anggotanya sangatlah diharapkan dalam suatu organisasi. Dan dalam suatu organisasi pasti mengharapkan adanya suatu perubahan, maka dari itu seorang pemimpin yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi anggotanya harus mampu membuat perubahan, tentunya perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang baik majunya organisasi tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai yang berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD RI 1945. Menurut Ginting (Jurnal skripsi 2010) mengatakan PDI Perjuangan sebagai suatu organisasi sosial politik memiliki tujuan antara lain:

- a. Mewujudkan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- b. Melestarikan tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagai Negara hukum yang demokratis;
- c. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila dengan menggelorakan semangat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- e. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan diatas, menunjukkan bahwa PDI-P merupakan salah satu partai politik yang diharapkan mampu berpartisipasi politik dalam melaksanakan sistem kehidupan bernegara berdasarkan pada konstitusi UUD 1945, terkhusus bagi kader partai yang akan menjadi anggota legislatif dan akan menjalankan fungsi kekuasaan.

Dalam Berita Online Lentera Indonesia (diakses pada 17 Maret 2016, 19.25) LSM GRPKK merasa sangat prihatin atas sikap dan perilaku para oknum pejabat di jajaran Pemkab Samsir yang terlihat sangat korup dan banyak perilaku lainnya yang menggambarkan budaya buruk.

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) akhir tahun 2009, dimana terdapat ada 48 kasus hasil audit BPK RI yang belum mendapat penyelesaian. Dan hal tersebut telah disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Samsir pada sidang paripurna LKPJ 2009. Namun kasus itu dapat lolos di dewan terhormat itu. LSM GRPKK menduga ada “main mata” antara Pemerintah Kabupaten Samsir dengan DPRD kabupaten Samsir sehingga pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD 2009 dapat diterima oleh dewan yang terhormat itu.

Pada periode 2009-2014, jajaran Pemkab Samsir diduga tidak hanya melakukan korupsi anggaran, namun dugaan pungli terhadap para pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil juga telah terjadi. Hal ini dibuktikan dari laporan peserta CPNS 2009 Pemkab Samsir kepada KPK yang ditanda tangani oleh 5 peserta. Bukti lainnya adalah surat dari anggota DPRD Kabupaten Samsir kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Samsir tertanggal 20 Januari 2010 mengenai pengajuan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Samsir tentang Penerimaan CPNS Formasi TA 2009 dan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS yang masuk Data Base.

Dalam Harian SIB (diakses pada 17 Maret 2016, 19.30), Anggota DPRD Samosir, Pahalatua Simbolon, menanggapi hal itu mengatakan bahwa para pejabat pelaku korupsi di Samosir itu bukan karena lemahnya pengawasan dari pihak terkait maupun DPRD Samosir, namun karena mental dari pejabat yang bersangkutan.

Maka dari itu diharapkan adanya kesadaran dari setiap individu untuk menjalankan fungsinya dengan benar, agar terhindar dari perilaku korupsi dan tentunya pengawasan dari pihak terkait maupun DPRD Samosir agar lebih ditingkatkan supaya tidak ada celah sedikitpun bagi para pejabat untuk melakukan koruptor.

Dari uraian diatas penulis mengamati bahwasanya di Kabupaten Samosir ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi budaya buruk, yang diantaranya yaitu korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Kabupaten Samosir. Seperti yang telah diungkapkan salah satu anggota DPRD Samosir bahwa pelanggaran yang telah dilakukan para pejabat di Kabupaten Samosir tersebut adalah dikarenakan mental dari pejabat yang bersangkutan. Maka dari itu perlu pembenahan diri dari masing-masing pejabat. Sebagai pemegang kekuasaan para pejabat tersebut diharapkan dapat menjadi cerminan yang baik bagi masyarakat yang terlihat dari pola perilakunya dalam menjalankan fungsinya.

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan mengangkat sebuah judul “Peran Kepemimpinan PDI-P Dalam Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Anggota Legislatif Di Kabupaten Samosir.

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak mungkin terjadi kesimpangsiuran dalam membahas dan meneliti masalah yang ada. Jika identifikasi masalah sudah jelas, tentu dapat dilakukan penelitian lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bentuk kepemimpinan PDI-P dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi anggota legislatif..
2. Bagaimana peran kepemimpinan PDI-P terhadap kesadaran berkonstitusi anggota legislatif.
3. Hal-hal yang dilakukan PDI-P guna upaya sadar berkonstitusi anggota legislatif.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar peneliti terarah dan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang. Maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Peran Kepemimpinan PDI-P dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi anggota legislatif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Peran Kepemimpinan PDI-P

dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi anggota legislatif di Kabupaten Samosir.

E. Tujuan Penelitian

Dalam menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting karena setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan tertentu, dengan berpedoman pada tujuannya.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan permasalahan diatas adalah: untuk mengetahui peran kepemimpinan PDI-P dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi anggota legislatif di Kabupaten Samosir.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulih adalah sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memperkaya keilmuan khususnya di ilmu-ilmu sosial di Universitas Negeri Medan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi, pengetahuan teoritis, menambah wawasan mengenai kepemimpinan dan pentingnya kesadaran akan berkonstitusi.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan berpikir khususnya dalam bidang kajian ilmu politik.
4. Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dasar untuk melakukan penelitian berikutnya.